



berjenjang secara online. "Kami sudah melakukan pengecekan. Sebenarnya tidak ada menumpuk tapi karena tempat ruang tunggu yang terbatas, jadi terlihat menumpuk. Ini sudah mulai diatur oleh rumah sakit-rumah sakit kelas D dan C," tambahnya.

Ditegaskan penerapan sistem rujukan online sama sekali tak mengurangi manfaat yang diterima oleh peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan. Pelayanan kesehatan kepada peserta sesuai kebutuhan medis berdasarkan fasilitas kesehatan yang tersedia. Ujicoba sistem rujukan online ini dilakukan sampai dengan 15 Oktober 2018. "Untuk kasus emergency ketentuannya masih sama, peserta bisa langsung ke rumah sakit tanpa rujukan," ujar Hesti.

Terkait dengan masukan dari Pemkot Yogyakarta pihaknya mengaku sudah melakukan pertemuan koordinasi de-

ngan Dinas Kesehatan Yogyakarta. "Intinya kami sepakat dalam menjalankan program JKN. Jiak dalam hal perjalanan ada sesuatu hal yang baru sama-sama untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem," terangnya.

Sebelumnya Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan Pemkot Yogyakarta melalui walikota sudah meminta agar sistem rujukan berjenjang itu ditinjau kembali. Itu karena tidak efisien, memberatkan dan menjadikan pelayanan kesehatan yang cepat tidak tercapai.

"Warga yang dekat dengan pelayanan kesehatan kalau harus dengan sistem rujukan berjenjang itu malah jadi lebih jauh. Itu akan menambah beban biaya transportasi bagi warga. Makanya kami minta ditinjau ulang. Alternatifnya kembali ke sistem seperti semula atau ada model lain yang lebih efisien," ucap Heroe. (Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005